

KONSTRUKSI WACANA PODCAST BOCOR ALUS POLITIK “AKTOR DAN LOBI-LOBI DI BALIK REVISI UU TNI”: PERSPEKTIF TEUN A. VAN DIJK

Rahmah Rahmadani

Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Surabaya
rahmah.22063@mhs.unesa.ac.id

Arie Yuanita

Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Surabaya
arieyuanita@unesa.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan konstruksi wacana dalam podcast *Bocor Alus Politik* episode “Aktor dan Lobi-Lobi di Balik Revisi UU TNI” menggunakan analisis wacana kritis Teun A. van Dijk yang berfokus pada dimensi teks. Metode kualitatif digunakan dalam penelitian ini dengan teknik pengumpulan data berupa simak bebas libat cakap (SBLC) dan catat. Data dalam penelitian ini berupa tuturan tiga jurnalis Tempo yang ditranskripsikan dan dianalisis berdasarkan struktur makro, superstruktur, dan struktur mikro. Teknik analisis data yang digunakan yaitu model Miles dan Huberman melalui tiga tahapan, berupa reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ditunjukkan melalui tema yang diangkat yaitu proses pembentukan revisi Undang-Undang TNI dianggap tidak ideal. Tema tersebut didukung oleh sejumlah subtopik yang memperkuat makna global wacana. Pada aspek superstruktur, wacana disusun secara sistematis melalui bagian pendahuluan, isi, dan penutup. Setelah itu, pada struktur mikro, penggunaan strategi kebahasaan seperti aspek semantik, sintaksis, stilistik, dan retorik dimanfaatkan untuk menegaskan kritik, membangun makna, dan memengaruhi pemahaman audiens terhadap isu revisi UU TNI.

Kata Kunci: dimensi teks, podcast, revisi UU TNI, Teun A. van Dijk

Abstract

This study aims to describe the discourse construction in the “Bocor Alus Politik” podcast episode titled “Actors and Lobbying Behind the Revision of the TNI Law” using Teun A. van Dijk’s critical discourse analysis, which focuses on the textual dimension. A qualitative method was employed in this study, utilizing data collection techniques such as participant observation and note-taking. The data consist of the transcribed utterances of three Tempo journalists, analyzed based on macro-structure, superstructure, and micro-structure. The data analysis technique used is the Miles and Huberman model, which involves three stages: data reduction, data processing and analysis, and finally, drawing conclusions. The research results are demonstrated through the central theme that the process of revising the TNI Law is considered suboptimal. This theme is supported by a number of subtopics that reinforce the global meaning of the discourse. At the superstructure level, the discourse is systematically organized into an introduction, body, and conclusion. Subsequently, at the microstructure level, linguistic strategies—including semantic, syntactic, stylistic, and rhetorical aspects—are employed to emphasize criticism, construct meaning, and influence the audience’s understanding of the issue regarding the revision of the TNI Law.

Keywords: podcast, revision of the TNI Law, Teun A. van Dijk, textual dimension.

PENDAHULUAN

Seratus hari pertama pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka diwarnai berbagai kebijakan yang memunculkan respons kritis dari masyarakat. Salah satu kebijakan yang memicu penolakan publik adalah revisi Undang-Undang TNI yang dinilai berpotensi berpotensi memperluas dominasi militer dalam

ranah sipil. Perubahan tersebut menimbulkan kekhawatiran akan kembalinya praktik dwifungsi militer dan memicu berbagai bentuk kritik di ruang publik, baik melalui demonstrasi maupun media digital.

Salah satu media yang aktif mengangkat isu tersebut adalah podcast *Bocor Alus Politik* yang diproduksi Tempo Media episode “Aktor dan Lobi-Lobi di Balik Revisi UU TNI”. Podcast yang ditayangkan melalui kanal YouTube

resmi mereka ini tayang setiap Sabtu dalam platform Spotify dan YouTube dengan fokus pembahasan pada topik politik, analisis, dan pengalaman para jurnalis selama proses liputan. Episode dengan durasi 40 menit 17 detik ini dipandu tiga jurnalis Tempo—Hussein Abri Dongoran, Stefanus Pramono, dan Francisca Christy Rosana—mengupas bagaimana kekuatan politik, dan kepentingan elite berperan dalam pembentukan regulasi yang berpotensi mengancam demokrasi. Pembahasan menyoroti lemahnya komunikasi politik antara pemerintah dengan masyarakat sipil. Banyak pihak merasa proses pembahasan revisi berlangsung tertutup dan minim partisipasi publik. Episode tersebut diunggah pada 22 Maret 2025, hingga Juli 2025 tercatat telah mencapai 3,5 juta penayangan. Menurut Tempo, konten ini populer karena konsumsi informasi yang mendalam dan terbuka, hingga pernah mendapat penghargaan *Udin Award* dalam perayaan Hari Ulang Tahun Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) ke-30 pada Jumat malam, 9 Agustus 2024. Penghargaan ini diputuskan tiga juri yang menilai *Bocor Alus Politik* telah menginspirasi publik soal pentingnya memperjuangkan kebebasan pers, serta pemenuhan hak atas informasi.

Perhatian publik terhadap podcast *Bocor Alus Politik* semakin besar ketika para jurnalis Tempo mengungkapkan adanya intimidasi yang mereka terima setelah mengkritisi revisi UU TNI. Dalam podcast tersebut diceritakan bahwa redaksi Tempo menerima paket berisi kepala babi tanpa telinga dan bangkai tikus yang diduga sebagai bentuk tekanan terhadap kerja jurnalistik. Ancaman ini memunculkan reaksi luas dari masyarakat dan organisasi pers karena dianggap sebagai bentuk ancaman terhadap kebebasan pers dan kebebasan berpendapat di ruang publik. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa wacana media tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga memiliki pengaruh dan dampak nyata hingga memicu respons negatif dari pihak-pihak tertentu. Kondisi ini memperlihatkan bahwa produksi wacana di ruang publik, terutama wacana yang mengulas kepentingan kekuasaan, tidak terlepas dari konsekuensi sosial dan politik.

Dalam sebuah wacana, pemilihan topik, penyusunan alur pembahasan, hingga penggunaan kata tertentu dapat memengaruhi cara audiens memahami suatu persoalan. Bahasa yang digunakan pembicara tidak bersifat netral, tetapi menunjukkan sikap, pandangan, dan kepentingan tertentu. Oleh karena itu, pembahasan mengenai revisi UU TNI dalam podcast *Bocor Alus Politik* menarik untuk dikaji lebih mendalam karena tidak hanya memuat informasi politik, tetapi juga memperlihatkan bagaimana kritik terhadap pemerintah dibangun melalui bahasa dan strategi penyampaian tertentu. Untuk mengkaji lebih dalam, penelitian ini menggunakan pendekatan analisis wacana kritis van Dijk yang berfokus pada dimensi teks

melalui tiga struktur, struktur makro, superstruktur, dan struktur mikro. Struktur makro digunakan untuk melihat tema atau topik utama yang dibangun dalam teks. Superstruktur untuk melihat bagaimana alur pembahasan disusun. Kemudian, struktur mikro digunakan untuk mengkaji pilihan kata, bentuk kalimat, metafora, dan strategi kebahasaan lainnya yang digunakan dalam membangun makna. Struktur mikro terlihat melalui pemilihan kata “ngawur” yang mengekspresikan ketidaksetujuan pembicara terhadap tindakan pemerintah yang terlalu sembrono terhadap proses revisi UU TNI dan ungkapan “gula-gula” digunakan untuk menggambarkan pasal-pasal yang terdengar manis, tetapi menyimpan potensi memperluas dominasi militer. Melalui pendekatan ini, penelitian dapat mengungkap bagaimana podcast *Bocor Alus Politik* membangun kritik terhadap revisi UU TNI sekaligus menunjukkan sudut pandang atau sikap para jurnalis Tempo terhadap isu tersebut.

Analisis wacana dapat dipahami sebagai suatu pendekatan yang memungkinkan kita menelaah bahasa secara utuh (Eriyanto, 2011). Ghofur dan Ibrahim (2023) mengemukakan bahwa melalui pendekatan ini, makna, fungsi, dan pengaruh dari penggunaan bahasa dalam berbagai konteks komunikasi dapat dianalisis lebih dalam. Oleh karena itu, analisis wacana tidak hanya digunakan untuk memahami isi tuturan, tetapi juga untuk mengungkap tujuan dari penggunaan bahasa tersebut.

Dalam analisis wacana, bahasa dipandang sebagai alat yang dimanfaatkan untuk mencapai tujuan tertentu, seperti memengaruhi opini, memperkuat opini, dan lebih dari itu bahasa juga digunakan untuk menyampaikan ideologi yang dianut oleh penutur (van Dijk, 2008). Eriyanto (dalam Ghofur dan Ibrahim, 2023) melihat pemilihan kata, *framing* (penyusunan informasi), dan retorika yang digunakan berperan penting dalam membangun narasi yang sesuai dengan ideologi yang ingin disampaikan. Dengan demikian, bahasa tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi, tetapi juga sebagai alat untuk menyampaikan, memperkuat, dan melegitimasi ideologi yang ingin disampaikan pembicara. Sebuah wacana terkait erat dengan unsur dan fakta linguistik yang ada di dalamnya. Hal ini berfungsi besar untuk menegaskan bahwa sebuah topik akan menjadi kuat dengan teks yang dibuat. Oleh karena itu, penelitian ini hanya berfokus dalam analisis kebahasaan, lebih tepatnya menggunakan dimensi teks yang mencakup struktur makro, superstruktur, dan struktur mikro untuk memperlihatkan bahwa penggunaan bahasa memiliki peran sentral dalam membentuk sebuah makna.

Berdasarkan latar belakang tersebut, terlihat bahwa wacana dalam podcast dapat dilihat dari perspektif yang cukup dalam, tidak hanya dilihat sebagai informasi saja. Analisis ini bertujuan menangkap pesan sebenarnya yang

ingin disampaikan oleh ketiga jurnalis Tempo sekaligus *host* podcast tersebut menggunakan pendekatan analisis wacana kritis yang dikembangkan van Dijk. Peneliti berupaya mengkaji bagaimana wacana dalam acara *Bocor Alus Politik* dengan judul “Aktor dan Lobi-lobi di Balik Revisi UU TNI” dikonstruksi untuk menyampaikan kritik terhadap proses revisi UU TNI dan mengkaji bagaimana struktur wacana dalam episode tersebut mencerminkan sudut pandang atau sikap tertentu yang diambil oleh pembicara, mulai dari pernyataan jurnalis, pemilihan topik, hingga cara penyampaian narasi terkait revisi UU TNI. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti mengambil judul “Konstruksi Wacana Podcast *Bocor Alus Politik* ‘Aktor dan Lobi-Lobi di Balik Revisi UU TNI’: Perspektif Teun A. van Dijk”.

Dalam ranah kajian analisis wacana kritis, penelitian ini bukan merupakan kajian pertama, telah ada sejumlah penelitian terdahulu yang juga menggunakan teori van Dijk dengan objek yang beragam, seperti pidato, berita, program televisi, lirik lagu, dan media sosial Instagram dan YouTube, yang menjadi pedoman dan landasan dalam penyusunan penelitian ini.

Penelitian relevan pertama adalah skripsi yang disusun oleh Fita Permata Sari (2024) dengan judul “Analisis Wacana Teun A. van Dijk Terhadap Podcast YouTube Denny Sumargo”. Persamaan penelitian terletak pada pendekatan yang digunakan, yaitu analisis wacana kritis van Dijk dan pemanfaatan media yang dipakai berupa podcast dalam platform YouTube. Kedua penelitian berfokus pada struktur teks, mulai dari struktur makro, superstruktur, dan struktur mikro. Sari menggunakan podcast YouTube Denny Sumargo sebagai objek kajian, sedangkan penelitian ini memilih podcast *Bocor Alus Politik* untuk ditelaah aspek kebahasaannya. Lalu, kedua podcast memiliki gaya penyajian yang berbeda, podcast Denny Sumargo bersifat personal, emosional, dan mengangkat pengalaman pribadi narasumber langsung dari yang bersangkutan, sedangkan podcast Tempo memiliki gaya jurnalistik yang investigatif dan kritis dalam mengulas isu-isu kebijakan politik berdasarkan fakta.

Kemudian, penelitian dengan judul “Analisis Wacana Kritis Model Teun A. van Dijk pada Surat Kabar *Online Kompas* dengan Tajuk ‘Guru Dijejati Beragam Aplikasi Pendidikan’” disusun Seylla Arifeni dkk. (2024). Persamaan penelitian terdapat pada penggunaan pendekatan Analisis Wacana Kritis van Dijk sebagai landasan. Namun, analisis Arifeni dkk. menelaah struktur teks disertai konteks sosial, sedangkan penelitian ini hanya berfokus pada aspek kebahasaan dalam dimensi teks. Kemudian, perbedaan terlihat pada bentuk penyampaian elemen grafis, yaitu melalui media tulis pada surat kabar dan media lisan pada podcast. Pada penelitian Arifeni dkk.

dengan surat kabar *online Kompas* sebagai objek, elemen grafis diwujudkan dalam bentuk visual teks meliputi penggunaan tanda kurung, huruf tebal, dan tanda petik. Sementara itu, elemen grafis dalam penelitian ini diwujudkan dalam bentuk penekanan suara dan penggunaan gambar untuk menyoroti poin penting.

Penelitian terdahulu selanjutnya berjudul “Analisis Teun A. van Dijk pada Isu Nikah Muda di Akun Instagram @Premarriagetalk” ditulis oleh Nastaufika Firdausy (2023). Persamaan terlihat pada penggunaan Analisis Wacana Kritis van Dijk sebagai landasan. Namun, terdapat perbedaan yang terletak pada objek dan media yang dikaji. Firdausy mengkaji isu nikah muda yang dikemas melalui konten berbasis visual teks dalam bentuk *slide* konten edukatif pada akun instagram @premarriagetalk, sedangkan penelitian ini mengkaji media audio visual berupa podcast *Bocor Alus Politik*, yang memiliki karakteristik komunikasi bersifat dialogis dan argumentatif melalui interaksi antarpembicara. Perbedaan juga terletak pada fokus isu yang dikaji, Firdausy membahas isu nikah muda yang sarat akan nilai moral, agama, dan norma masyarakat, sedangkan penelitian ini berfokus pada isu politik revisi UU TNI yang memperlihatkan kepentingan kekuasaan dan kritik terhadap suatu kebijakan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis wacana kritis Teun A. van Dijk yang berfokus pada dimensi teks. Analisis wacana kritis digunakan untuk mengkaji bagaimana bahasa dimanfaatkan dalam membangun makna, menyampaikan perspektif tertentu, dan memengaruhi pemahaman audiens terhadap isu revisi UU TNI. Fokus analisis diarahkan pada dimensi teks yang dikemukakan van Dijk, yaitu struktur makro, superstruktur, dan struktur mikro. Sumber data penelitian ini berupa video podcast *Bocor Alus Politik* episode “Aktor dan Lobi-Lobi di Balik Revisi UU TNI” yang diunggah melalui kanal YouTube Tempo pada 22 Maret dengan durasi 40 menit 17 detik. Data penelitian berupa tuturan tiga jurnalis Tempo, yaitu Hussein Abri Dongoran, Stefanus Pramono, dan Francisca Christy Rosana, yang ditranskripsikan ke dalam bentuk teks.

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik simak bebas libat cakap (SBLC) dan teknik catat (Sudaryanto, 2018). Peneliti menyimak secara cermat keseluruhan isi podcast, mentranskripsikan tuturan pembicara, kemudian mengklasifikasikannya berdasarkan dimensi teks van Dijk. Analisis data mengacu pada model Miles dan Huberman (1992) yang dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis wacana ini akan difokuskan pada teks podcast *Bocor Alus Politik* episode “Aktor dan Lobi-Lobi di Balik Revisi UU TNI” pada platform YouTube Tempo yang ditelaah secara mendalam dengan menggunakan dimensi teks Analisis Wacana Kritis van Dijk. Hal ini dilakukan untuk melihat bagaimana bahasa digunakan guna membangun makna dan menyampaikan ideologi. Oleh karena itu, diperlukan penguraian secara linguistik dengan memperhatikan aspek-aspek kebahasaan seperti semantik, struktur kalimat, koherensi, kata ganti, dan pemilihan diksi yang membentuk makna dari wacana. Adapun beberapa aspek yang dapat diidentifikasi dalam dimensi teks van Dijk:

1. Struktur Makro

Struktur makro mencakup topik dan subtopik yang diangkat dalam suatu wacana (Pramitasari dan Khofifah, 2022). Struktur ini merujuk pada makna umum dari isi podcast yang dapat dicermati melalui tema atau topik yang dibahas. Hal tersebut sejalan dengan pendapat yang dikemukakan Dewi dkk. (2023) bahwa struktur makro merupakan gagasan atau tema utama dalam sebuah wacana. Eriyanto (2001) juga memaparkan bahwa topik mencerminkan gagasan apa yang dikedepankan pembicara dalam memandang suatu peristiwa.

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, fokus utama yang menjadi pokok gagasan dalam wacana podcast *Bocor Alus Politik* dengan judul “Aktor dan Lobi-Lobi di Balik Revisi UU TNI” merupakan sebuah isu yang masih sangat kontroversial dan menjadi perbincangan hangat di masyarakat sejak kepemimpinan presiden baru Republik Indonesia. Tema yang diangkat adalah proses pembentukan revisi Undang-Undang TNI tidak ideal. Revisi UU TNI dianggap bermasalah dalam banyak hal, terlihat dari penolakan keras yang ditunjukkan masyarakat karena khawatir kebijakan ini akan memperluas peran militer dalam ranah sipil.

Tema ini menjadi pusat diskusi yang mengarahkan seluruh pernyataan dan argumen dalam podcast. Tema utama tersebut dibangun oleh sejumlah subtopik yang saling berkaitan, seperti tujuan revisi UU TNI, perluasan peran TNI, kritik masyarakat sipil, proses pembahasan yang dinilai tidak transparan, kepentingan politik yang terlibat, dan dampak revisi terhadap profesionalisme militer. Keseluruhan subtopik tersebut saling mendukung dan memperkuat sehingga membentuk makna global wacana yang menunjukkan masalah di balik revisi UU TNI.

2. Superstruktur

Superstruktur diartikan sebagai urutan atau alur sebuah wacana yang memperlihatkan bagaimana bagian-bagiannya disusun secara sistematis hingga membentuk kesatuan makna (Prihartono dan Suharyo, 2022). Selaras

dengan itu, Eriyanto (2011) menjelaskan bahwa penulis atau pembicara mengatur bagian mana yang menjadi awal (pendahuluan), tengah (isi), serta akhir (penutup). Analisis terhadap aspek ini membantu memahami bagaimana informasi penting disampaikan, disusun, dan diurutkan, bagian mana yang ditekankan dan bagaimana urutan penyampaian (didahulukan atau diakhirkan).

(1) Pendahuluan

Bagian pembuka diawali dengan pengantar mengenai situasi yang dialami salah satu jurnalis Tempo, Francisca, yang menerima intimidasi. Dalam beberapa bulan terakhir, kiriman kepala babi, bangkai tikus dengan kepala terpotong, hingga telepon spam ditujukan kepada dirinya hingga keluarganya. Ketiga pembicara menegaskan akan tetap berkomitmen menjalankan tugasnya sebagai jurnalis sekalipun menghadapi berbagai bentuk intimidasi.

Data (SS-1)

“Tentu saja teror ini sudah kasekian kalinya menimpa teman-teman, kami kira itu tidak akan membuat kami berhenti dan kami akan terus hadir untuk pemirsa juga pembaca Tempo.” (*Bocor Alus Politik*, 2:49-3:05)

Penggalan tuturan tersebut merupakan bagian pembuka dari siaran podcast *Bocor Alus Politik* episode “Aktor dan Lobi-Lobi di Balik Revisi UU TNI”. Pernyataan dalam kutipan tersebut bertujuan sebagai pengantar mengenai situasi yang sedang dan telah dihadapi oleh pembicara berupa tindakan teror yang ditujukan kepada jurnalis-jurnalis Tempo, terlebih Francisca—wartawan Tempo untuk desk politik yang kerap mengangkat isu-isu sensitif sekaligus *host* siaran *Bocor Alus Politik*. Teror tersebut diduga dari sosok yang tidak senang dengan pemberitaan yang Francisca buat. Dikutip dari BBC News Indonesia, teror ini bukan yang pertama kalinya, karena dalam sebulan terakhir, jurnalis Tempo tersebut kerap dihubungi nomor yang tidak dikenal dan sering merasa dikuntit oleh sosok mencurigakan. Hussein Abri yang ikut menjadi pembicara dalam episode ini juga mengalami ancaman serupa, dikontak berulang-ulang, kaca mobil dirusak orang tidak dikenal dalam rentang empat bulan terakhir. Serangan terhadap pers dan jurnalis bukan hanya membahayakan individu, tetapi juga mengancam kebebasan pers dan demokrasi. Pernyataan tersebut menunjukkan sikap pembicara yang menerima ancaman akan tetap berkomitmen menjalankan tugasnya sebagai jurnalis sekalipun menghadapi berbagai intimidasi. Bagian pendahuluan berfungsi sebagai konteks awal serta mengarahkan pendengar agar memahami latar belakang situasi sebelum memasuki pembahasan utama mengenai revisi UU TNI. Selain itu, bagian pendahuluan juga menjadi pengantar yang menghubungkan situasi

intimidasi terhadap media dengan isu yang akan dibahas, yaitu revisi UU TNI yang menjadi perhatian publik.

(2) Isi

Bagian isi merupakan inti wacana yang memuat pembahasan secara mendalam terkait revisi UU TNI. Pada tahap isi, secara keseluruhan ketiga pembicara menjabarkan gagasannya dalam bentuk narasi yang membandingkan berbagai perspektif, berusaha menjelaskan terlebih dahulu apa itu revisi Undang-Undang TNI dan mengapa revisi ini diperlukan. Gagasan-gagasan yang dilontarkan ketiga jurnalis terlihat runtut, jelas, dan mudah dipahami. Kutipan berikut menunjukkan awal pembahasan dimulai.

Data (SS-2)

"Kita akan main hari ini soal revisi undang-undang TNI yang ramai sekali dibahas gitu ya." (*Bocor Alus Politik*, 3:39-3:43)

Pernyataan tersebut merupakan bagian isi dari wacana podcast yang berfungsi sebagai pengantar menuju pembahasan utama yaitu revisi UU TNI. Stefanus mengarahkan pendengar agar memahami topik utama yang akan dibahas dan menunjukkan bahwa revisi UU TNI merupakan isu yang sedang menjadi sorotan banyak pihak dan relevan untuk dibahas karena menimbulkan berbagai tanggapan hingga kontroversi dari masyarakat. Kalimat tersebut menjadi awal dari pembahasan yang lebih mendalam mengenai latar belakang revisi, aktor yang terlibat, dan pengaruh dari revisi tersebut. Selanjutnya, latar belakang revisi Undang-Undang TNI dan aktor yang terlibat dalam proses revisi terlihat melalui data berikut.

Data (SS-3)

"Pembahasan revisi UU TNI ini sudah mulai digodok Prabowo ketika dia masih menjadi Menhan (Menteri Pertahanan)." (*Bocor Alus Politik*, 4:19-4:24)

Hussein Abri menjelaskan awal mula proses revisi UU TNI sekaligus menyebutkan aktor utama yang terlibat dalam kebijakan tersebut. Pada bagian ini, wacana mulai memasuki inti pembahasan dengan memberikan informasi latar belakang terkait siapa yang menginisiasi revisi dan sejak kapan proses tersebut dimulai. Hussein menegaskan bahwa revisi UU TNI bukanlah kebijakan yang muncul secara tiba-tiba, melainkan telah direncanakan Prabowo Subianto sejak masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Penggunaan frasa "sudah mulai digodok" menunjukkan bahwa proses revisi telah melalui perencanaan yang cukup lama. Kemudian, penyebutan jabatan "Menteri Pertahanan" berfungsi memperkuat dan memperlihatkan aktor yang berperan, karena posisi tersebut memiliki otoritas langsung terhadap isu militer, termasuk regulasi terkait TNI. Lebih dari itu, kalimat ini

juga mengindikasikan bahwa revisi UU TNI merupakan bagian dari agenda politik yang telah disiapkan sebelumnya. Kutipan ini tidak hanya menyampaikan informasi faktual mengenai waktu dan aktor di balik revisi UU TNI, tetapi juga membangun pemahaman bahwa revisi UU TNI merupakan kebijakan yang terstruktur dan dirancang sejak awal oleh aktor yang memiliki kekuasaan dalam bidang pertahanan.

Data (SS-4)

"Prabowo ini melihat undang-undang yang lama ini usang." (*Bocor Alus Politik*, 5:15-5:19)

Hussein menggambarkan revisi UU TNI didasarkan pada anggapan bahwa undang-undang yang lama sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini. Pertama, penggunaan kata "melihat" menunjukkan bahwa pernyataan tersebut merupakan perspektif atau penilaian subjektif dari Prabowo. Hal ini menandakan bahwa kebijakan revisi dibangun atas interpretasi subjektif terhadap kondisi regulasi yang ada. Kedua, kata "usang" memiliki makna bahwa undang-undang tersebut dianggap ketinggalan zaman, tidak lagi sesuai dengan perkembangan situasi politik serta kebutuhan sistem pemerintahan saat ini. Penggunaan diksi ini berfungsi memperkuat alasan dilakukannya revisi, karena sesuatu yang "usang" secara logis perlu diperbarui. Ketiga, kalimat ini juga mengarahkan audiens untuk memahami bahwa revisi UU TNI diposisikan sebagai langkah pembaruan, bukan sekadar perubahan biasa.

Data (SS-5)

"Pasal 47 misalnya yang memperluas peran TNI di berbagai kementerian dan lembaga yang tidak terbatas." (*Bocor Alus Politik*, 7:27-7:38)

Penggalan tuturan yang dinyatakan Francisca menjelaskan perubahan inti dalam revisi Undang-Undang TNI, khususnya terkait perluasan peran TNI dalam ranah sipil. Pada bagian ini, wacana tidak lagi hanya membahas latar belakang atau alasan revisi, tetapi mulai menguraikan isi konkret dari pasal yang direvisi. Hal ini menunjukkan bahwa pembicara memperinci kebijakan yang dibahas agar audiens memahami dampak langsung dari revisi tersebut. Kalimat tersebut menggambarkan bahwa revisi UU TNI memberikan ruang yang lebih luas bagi TNI untuk terlibat dalam berbagai kementerian dan lembaga sipil. Pertama, penggunaan frasa "memperluas peran TNI" menunjukkan adanya perubahan dari fungsi sebelumnya, dari yang semula terbatas pada bidang pertahanan menjadi lebih luas mencakup sektor sipil. Kedua, frasa "berbagai kementerian dan lembaga" menegaskan bahwa keterlibatan tersebut tidak hanya pada satu atau dua institusi, melainkan sektor-sektor lainnya dalam pemerintahan. Ketiga, penggunaan kata "tidak terbatas"

memperkuat kesan bahwa perluasan tersebut bersifat luas dan berpotensi tanpa batasan yang jelas, sehingga membuka kemungkinan masuknya TNI ke berbagai ranah sipil. Selanjutnya wacana membahas respons yang muncul dari masyarakat sipil terhadap dampak dari revisi UU TNI.

Data (SS-6)

“Masyarakat sipil itu sudah bergejolak menentang revisi undang-undang TNI karena ada kekhawatiran mengembalikan dwifungsi TNI.” (*Bocor Alus Politik*, 12:32 -12:42)

Francisca menegaskan respons masyarakat sipil terhadap revisi UU TNI. Melalui tuturan tersebut terlihat bahwa revisi UU TNI menimbulkan reaksi dari masyarakat sipil yang khawatir terhadap dampak dari revisi tersebut. Kalimat tersebut menggambarkan adanya penolakan yang kuat dari masyarakat terhadap revisi UU TNI ditandai penggunaan kata “bergejolak” yang menunjukkan bahwa respons yang muncul tidak bersifat biasa, melainkan intens dan meluas, menandakan adanya ketidakpuasan publik terhadap kebijakan tersebut. Kemudian, frasa “menentang revisi UU TNI” menegaskan posisi masyarakat sipil yang secara jelas berada pada pihak yang tidak setuju terhadap kebijakan tersebut. Alasan penolakan tersebut dilengkapi dengan pernyataan “karena ada kekhawatiran mengembalikan dwifungsi TNI” yang menunjukkan bahwa masyarakat sipil memandang revisi ini berpotensi menghidupkan kembali peran ganda militer dalam ranah sipil dan memperlihatkan adanya konflik wacana antara pemerintah dan masyarakat sipil. Pemerintah memposisikan revisi sebagai pembaruan regulasi, sementara masyarakat sipil memaknainya sebagai ancaman terhadap prinsip demokrasi. Bagian isi merupakan bagian yang paling dominan karena memuat keseluruhan informasi utama yang menjadi fokus wacana dan menunjukkan bahwa struktur isi dalam wacana berfungsi untuk mengembangkan topik utama secara lebih mendalam setelah bagian pembuka.

(3) Penutup

Bagian penutup berisi penegasan sikap kritis pembicara terhadap revisi UU TNI dan dampaknya terhadap profesionalisme militer. Pada bagian ini, pembicara tidak lagi menjelaskan fakta atau proses, tetapi menyampaikan penilaian yang lebih tegas terhadap revisi UU TNI. Melalui penutup ini, pembicara mengarahkan audiens pada kesimpulan bahwa revisi UU TNI dipandang berpotensi berdampak pada profesionalisme TNI.

Data (SS-7)

“Revisi Undang-Undang TNI ini sudah jelas sangat merugikan TNI sendiri, karena TNI menjadi tidak profesional. TNI justru menjadi korban dari revisi Undang-Undang TNI itu sendiri ya.” (*Bocor Alus Politik*, 39:15-39:18)

Keseluruhan pembahasan yang telah disampaikan sebelumnya dipertegas melalui pernyataan Stefanus yang memandang bahwa revisi UU TNI memiliki dampak negatif terhadap profesionalisme TNI. Kesimpulan pandangan dari ketiga jurnalis Tempo terhadap revisi UU TNI ditandai penggunaan frasa “sudah jelas” yang menunjukkan bahwa pernyataan tersebut diposisikan sebagai sesuatu yang tidak perlu diperdebatkan lagi, sehingga memperkuat keyakinan pembicara terhadap dampak kebijakan tersebut. Lalu, frasa “sangat merugikan” menegaskan adanya konsekuensi negatif yang besar. Setelah itu, klausa “TNI menjadi tidak profesional” menunjukkan implikasi langsung dari revisi tersebut, yaitu penurunan profesionalisme militer yang seharusnya berfokus pada fungsi pertahanan negara.

Pada bagian penutup pembicara menyampaikan evaluasi atau penilaian akhir yang merangkum keseluruhan argumen. Kutipan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai kesimpulan, tetapi juga sebagai bentuk penegasan ideologis bahwa revisi UU TNI dipandang memiliki dampak negatif terhadap sistem militer dan sistem pemerintahan. Struktur penutup berfungsi memperkuat inti wacana melalui penegasan akhir yang bersifat penilaian dan merangkum keseluruhan pembahasan yang telah disampaikan sebelumnya.

3. Struktur Mikro

Makna wacana dalam struktur mikro dijelaskan melalui empat aspek, yaitu semantik, sintaksis, stilistik, dan retorik. Retanto (dalam Firdausy, 2023) menyebutkan bahwa analisis terhadap empat aspek ini dilakukan dengan menelaah bagian-bagian kecil dalam teks, seperti pemilihan kata, struktur kalimat, gaya bahasa, dan unsur visual seperti gambar. Analisis ini bertujuan mengungkap bagaimana makna, ideologi, dan sikap pembicara direpresentasikan melalui unsur-unsur kebahasaan dalam wacana. Unsur-unsur ini meliputi:

(1) Semantik

Semantik berhubungan dengan informasi yang ditekankan. Penekanan dilakukan dengan memberikan detail pada sisi tertentu dan menjelaskan secara eksplisit suatu bagian. Semantik terdiri dari beberapa elemen, yaitu latar, detail, dan maksud.

a. Latar

Latar adalah informasi yang digunakan untuk memberikan konteks terhadap peristiwa yang dibahas dalam wacana. Latar berfungsi mengarahkan bagaimana teks dikembangkan. Latar juga menghadirkan situasi yang memengaruhi pemahaman penonton terhadap isu revisi Undang-Undang TNI yang diangkat. Dalam wacana podcast ini, ketiga jurnalis menyampaikan pandangannya atas permasalahan revisi UU TNI sebagai kebijakan yang menuai kontroversi dan menerima penolakan publik. Hal ini dapat terlihat pada data berikut.

Data (SMik-1)

"Kita akan main hari ini soal revisi undang-undang TNI yang ramai sekali dibahas." (*Bocor Alus Politik*, 3:39-3:43)

Tayangan podcast ini dilatarbelakangi oleh keresahan pembawa acara serta masyarakat terhadap isu revisi Undang-Undang TNI yang dilangsungkan tanpa transparansi yang jelas dan melibatkan banyak aktor serta lobi-lobi yang didesain sedemikian rupa untuk melegalkan kepentingan tertentu. Pernyataan yang disampaikan Stefanus ini menunjukkan bahwa tujuan adanya episode podcast ini untuk membahas isu yang sedang hangat dan menjadi perbincangan luas di masyarakat ditandai dengan penggunaan "ramai sekali dibahas". Episode ini hadir untuk merespons situasi sosial yang sedang berkembang dan memperlihatkan tingkat perhatian publik yang tinggi terhadap isu revisi UU TNI. Data latar juga berfungsi untuk mengarahkan penonton memahami bahwa pembahasan episode ini bertujuan mengulas, menjelaskan, dan mengkritisi isu revisi UU TNI yang sedang ramai dibicarakan, khususnya terkait aktor dan perubahan di balik revisi undang-undang tersebut.

b. Detail

Detail merupakan informasi yang disampaikan secara spesifik untuk memperjelas peristiwa atau isu dalam wacana. Elemen ini berkaitan dengan bagaimana komunikator mengontrol informasi yang disajikan. Dalam analisis van Dijk, pemberian detail tertentu dipandang sebagai strategi semantik untuk menonjolkan aspek yang dianggap penting. Melalui tayangan ini, pembicara memberikan detail mengenai pasal-pasal yang dinilai kontroversial.

Data (SMik-2)

"Jadi tentunya Pak Bambang Eko sebagai ketua panja pemerintah untuk membahas revisi Undang-Undang TNI. Lalu, ada juga Menteri Pertahanan Safri Samsudin yang menjadi komando revisi undang-undang TNI, lalu kalau di DPR ada Sufmi Dasko Ahmad, Ketua Harian Gerindra dan Wakil Ketua DPR begitu si, Pram. Tiga motornya untuk revisi undang-undang TNI ini." (*Bocor Alus Politik*, 5:59-6:32)

Pada kutipan tersebut, Hussein menyampaikan informasi secara rinci dengan menyebutkan nama, jabatan, dan peran masing-masing tokoh yang mendorong proses revisi UU TNI. Bambang Eko Suhariyanto dijelaskan sebagai ketua panja (panitia kerja), Safri Samsudin sebagai Menteri Pertahanan yang disebut menjadi komando dalam revisi, dan Sufmi Dasko Ahmad sebagai Wakil Ketua DPR sekaligus tokoh partai. Penyampaian detail ini menunjukkan bahwa pembahasan revisi UU TNI melibatkan aktor-aktor utama yang digambarkan dengan

istilah "tiga motor" atau penggerak utama dalam proses revisi UU TNI.

Data (SMik-3)

"Lalu, ada juga pasal 39 misalnya yang membolehkan TNI berbisnis gitu. Pemerintah waktu itu atau Prabowo ya Kemhan itu sudah menyiapkan beberapa perwira gitu untuk disekolahkan di UNHAN untuk menambah kualitas dan kapabilitas di sektor bisnis." (*Bocor Alus Politik*, 7:42-8:14)

Francisca memberikan informasi secara spesifik adanya pasal 39 yang membuka ruang bagi TNI untuk terlibat dalam kegiatan bisnis. Selanjutnya, informasi diteruskan dengan salah satu langkah konkret yang telah dilakukan Kementerian Pertahanan di bawah arahan Prabowo bahwa sejumlah perwira TNI telah disiapkan dan disekolahkan di Universitas Pertahanan untuk meningkatkan kapabilitas di bidang bisnis. Melalui pernyataan tersebut, keterlibatan TNI dalam sektor bisnis digambarkan bukan sebagai sesuatu yang muncul secara tiba-tiba, melainkan sebagai bagian dari rencana yang telah dipersiapkan sebelumnya.

Data (SMik-4)

"Ketika itu Prabowo memanggil petinggi Gerindra. Nah, di hari Minggu 16 Maret 2025 kan ada rapat terbatas tuh di Hambalang di rumahnya Prabowo. Di situ soal bahas hilirisasi, ya. Tema utamanya tapi di situ Prabowo sempat bertanya kepada Menteri Pertahanan, Safri Samsudin, maupun Bambang Eko Wakmen Sesneg (Wakil Menteri Sekretaris Negara) ini apa sih yang terjadi kok ribut-ribut dan seterusnya." (*Bocor Alus Politik*, 17:38-18:14)

Pada penggalan tuturan tersebut terdapat detail waktu "Minggu 16 Maret" serta lokasi "Hambalang di rumahnya Prabowo" yang menunjukkan informasi yang konkret untuk menunjukkan penonton kapan dan di mana peristiwa tersebut terjadi. Lebih lanjut, Hussein menyebutkan secara jelas aktor-aktor yang terlibat dalam pertemuan tersebut, yaitu Prabowo sebagai presiden, Safri Samsudin sebagai Menteri Pertahanan, dan Bambang Eko sebagai Wakil Menteri Sekretaris Negara. Informasi spesifik ini memperlihatkan bahwa proses pembahasan tidak hanya berlangsung dalam rapat resmi lingkup formal, tetapi juga melalui pertemuan internal yang lebih terbatas.

c. Maksud

Maksud merupakan tujuan atau pesan yang ingin disampaikan oleh pembicara dalam wacana. Menurut Eriyanto (2001), informasi yang menguntungkan komunikator cenderung disampaikan secara jelas dengan pilihan kata yang tegas dan langsung merujuk pada fakta. Berdasarkan hasil analisis terhadap episode ini, terlihat bahwa fakta-fakta yang disajikan diungkapkan secara

gambang. Hal tersebut salah satunya dapat dilihat pada penggalan berikut.

Data (SMik-5)

“Nah di awal Maret itu, revisi undang-undang TNI dialihkan dari baleg ke Komisi I yang ketua panjanya (panitia kerja) adalah dari PDIP Utut Adianto. Setelah panja dibentuk, kemudian ada konsinyering nih, ada rencana konsinyering yang ramai-ramai di Fairmont (luxury hotel di Jakarta) itu. DIM yang baru yang dibahas di konsinyering itu DIM yang h-1 keluar sebelum konsinyering jadi baru H-1 keluar diterima oleh teman-teman di panja dan juga di Komisi I itu baru sorenya. Jadi besok nih, besok dibahas di Fairmont, sorenya baru mereka menerima DIM yang resmi.” (*Bocor Alus Politik*, 9:57-10:38)

Maksud pernyataan yang disampaikan Francisca adalah proses pembahasan revisi UU TNI dilakukan secara terburu-buru dan tidak melalui persiapan yang matang. Hal ini terlihat dari penyampaian fakta adanya perpindahan pembahasan dari Baleg ke Komisi I, Utut Adianto sebagai ketua panitia kerja, hingga pelaksanaan konsinyering di Hotel Fairmont disebutkan secara gamblang dan jelas. Selain itu, Francisca juga menekankan bahwa Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang menjadi bahan utama pembahasan baru diterima oleh anggota pada sore hari, sehari sebelum pembahasan dilakukan. Kemudian, penyebutan “Hotel Fairmont” menjadi bagian penting yang memberi makna bahwa pembahasan dilakukan di tempat yang eksklusif berupa hotel mewah di Jakarta. Lalu, penyampaian secara eksplisit waktu “H-1” dan “sorenya baru menerima DIM” menunjukkan bahwa informasi tersebut sengaja diuraikan secara jelas untuk menegaskan adanya proses yang dilakukan secara terburu-buru. Dengan menggabungkan informasi tempat (Hotel Fairmont) dan waktu (H-1 dan sore hari), pembicara membangun gambaran bahwa pembahasan berlangsung dalam situasi yang tidak ideal, tertutup, dan tergesa-gesa.

Data (SMik-6)

“Hari Senin itu berarti dua hari setelah konsinyering, Dasco atau Wakil Ketua Umum DPR ketemu dengan masyarakat sipil. Ada perwakilan masyarakat sipil, salah satunya dengan Bang Usman Hamid dari AMN (Amnesty international Indonesia) dan Bang Usman Hamid menyampaikan beberapa hal keberatan masyarakat sipil dengan perluasan tugas pokok TNI dan peran TNI di berbagai kementerian lembaga salah satunya adalah menyeroti soal tadi tuh, narkoba dan cyber gitu karena narkoba itu nanti bisa benturan dengan misalnya polisi.” (*Bocor Alus Politik*, 21:37-22:14)

Dalam penggalan tuturan tersebut Francisca menegaskan adanya penolakan dari masyarakat sipil terhadap revisi UU TNI, khususnya terkait perluasan peran

militer di ranah sipil. Informasi ini disampaikan secara eksplisit dengan menyebutkan waktu kejadian “dua hari setelah konsinyering” dengan argumen penguat oleh Usman Hamid dari AMN, serta inti keberatan yang dibicarakan, yaitu keterlibatan TNI dalam penanganan narkoba dan cyber. Penyampaian maksud ini menunjukkan informasi yang menguntungkan pembicara—adanya kritik dan penolakan dari masyarakat sipil—diuraikan secara jelas, tegas, dan berbasis fakta. Terlihat bahwa maksud yang ingin disampaikan dalam kutipan tersebut adalah memperkuat argumen bahwa revisi UU TNI menuai penolakan keras dari berbagai pihak, khususnya masyarakat sipil.

(2) Sintaksis

Sintaksis mengkaji bagaimana suatu peristiwa disampaikan melalui bentuk kalimat, koherensi, dan kata ganti. Van Dijk menjelaskan bahwa analisis sintaksis berkaitan dengan susunan dan penataan yang digunakan pembicara. Susunan tersebut diatur secara sistematis agar maksud dan tujuan komunikasi dapat tersampaikan dengan baik.

a. Bentuk kalimat

Bentuk kalimat terdiri dari kalimat aktif dan pasif yang memengaruhi penyampaian informasi. Struktur kalimat dapat disusun pasif ataupun aktif, tetapi umumnya unsur yang dianggap penting ditempatkan di awal kalimat (Eriyanto, 2011). Dalam tayangan podcast *Bocor Alus Politik* bentuk kalimat yang digunakan bervariasi antara kalimat pasif dan aktif, yang terlihat pada kutipan berikut.

Data (SMik-7)

“Prabowo melihat undang-undang yang lama ini usang.” (*Bocor Alus Politik*, 5:15-5:19)

Hussein Abri menuturkan pernyataannya menggunakan struktur aktif dengan menyebutkan “Prabowo” secara eksplisit sebagai subjek sekaligus pelaku utama. Penempatan “Prabowo” di awal kalimat ini menunjukkan bahwa Hussein, sebagai pembicara, ingin menonjolkan peran Prabowo, sehingga perhatian pendengar diarahkan pada subjek sebagai pihak memiliki otoritas dalam membentuk opini. Struktur aktif tersebut menempatkan Prabowo sebagai aktor utama yang memiliki pengaruh besar dalam menentukan arah kebijakan.

Data (SMik-8)

“Revisi Undang-Undang TNI dialihkan dari Baleg ke Komisi I.” (*Bocor Alus Politik*, 9:59-10:03)

Kalimat tersebut menggunakan struktur pasif yang ditandai dengan kata kerja “dialihkan”. Dalam kalimat ini, aktor yang melakukan pengalihan tidak disebutkan secara eksplisit, sehingga fokus diarahkan pada peristiwa pengalihan itu sendiri, bukan pada pelaku. Kemudian, frasa “dari baleg ke komisi I” berfungsi sebagai

keterangan yang menjelaskan adanya perpindahan proses pembahasan dari satu lembaga ke lembaga yang lain.

Data (SMik-9)

"Utusan itu membawa pesan untuk menyisipkan satu lembaga." (*Bocor Alus Politik*, 30:53-30:58)

Francisca menyampaikan pernyataannya menggunakan struktur aktif untuk menegaskan adanya tindakan yang dilakukan subjek (utusan itu). Pembicara menampilkan adanya perantara dalam proses komunikasi politik, yakni "utusan" yang bertugas menyampaikan pesan tertentu. Namun, meskipun menggunakan bentuk aktif, identitas aktor utama di balik pesan tersebut tidak disebutkan secara eksplisit, sehingga fokus hanya pada pelaku perantara, bukan pada pihak yang sebenarnya memiliki kepentingan. Francisca menunjukkan terdapat lapisan aktor dalam pembahasan revisi UU TNI dan memperlihatkan bahwa dalam sebuah wacana, pemilihan struktur kalimat dapat digunakan untuk mengatur siapa yang ditampilkan dan siapa yang disembunyikan.

b. Koherensi

Koherensi menunjukkan hubungan antara satu kalimat dengan kalimat lainnya sehingga membentuk kesatuan makna. Melalui koherensi dapat dilihat bagaimana seseorang secara strategis memanfaatkan wacana untuk menjelaskan suatu peristiwa, apakah diposisikan sebagai hal yang terpisah, saling berkaitan, atau memiliki hubungan sebab akibat. Pilihan tersebut ditentukan oleh sejauh mana kepentingan komunikator terhadap peristiwa yang dibahas. Kutipan berikut menunjukkan bentuk koherensi sebab-akibat

Data (SMik-10)

"Dulu kan kalau misalkan kita meliput pembahasan undang-undang kita bisa tuh nyomot-nyomotin draft-draft revisi undang-undang yang ada di meja, kadang-kadang ditinggalin, baca-baca atau minta sama sekretariat. Nah sekarang boroboro, kagak ada." (*Bocor Alus Politik*, 14:51-15:07)

Penggalan tuturan tersebut disampaikan Hussein untuk menunjukkan adanya koherensi yang bersifat perbandingan antara kondisi masa lalu dan masa kini melalui penggunaan kata "dulu" dan "sekarang". Hussein menggambarkan situasi di masa lalu ketika proses peliputan pembahasan undang-undang masih relatif terbuka, ditandai dengan kemudahan akses terhadap *draft* revisi yang dapat dibaca atau diperoleh secara langsung dari sekretariat. Sementara itu, keterbukaan informasi sekarang tidak terlihat begitu. Dengan membandingkan dua waktu yang berbeda, pembicara secara implisit memperlihatkan bahwa kondisi saat ini lebih buruk dibandingkan sebelumnya.

Data (SMik-11)

"Kalau misalkan ada perpanjangan masa usia jabatan ini artinya semua ritme yang ada itu bakal berubah dan mereka pasti akan pusing tuh bagian sdm-nya." (*Bocor Alus Politik*, 27:52-28:02)

Pernyataan tersebut disampaikan Hussein untuk menjelaskan sebab-akibat melalui penggunaan kata "kalau". Kebijakan perpanjangan usia jabatan dan pensiun TNI dapat mengakibatkan gangguan sistem pengelolaan sumber daya manusia. Hal ini diperjelas Stefanus melalui dampak lanjutan "penumpukan perwira non-job" yang memperluas konsekuensi dari kebijakan tersebut. Rangkaian ini membentuk hubungan sebab-akibat yang berlapis, mulai dari kebijakan (perpanjangan usia jabatan) dengan dampak (perubahan ritme organisasi) hingga konsekuensi nyata berupa penumpukan perwira non-job. Fakta dan pendapat ini disusun untuk memperlihatkan bahwa kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan beberapa masalah.

c. Kata Ganti

Penggunaan kata ganti menunjukkan posisi dan sudut pandang seseorang dalam wacana, serta mengidentifikasi kelompok atau individu yang dibicarakan. Kata ganti seperti "saya" dapat mempresentasikan sikap dari pembicara itu sendiri. Sementara itu, penggunaan kata ganti "kita" atau "kami" menunjukkan representasi sikap bersama antara pembicara dan pendengar (Eriyanto, 2011). Data kata ganti dijumpai pada tuturan berikut.

Data (SMik-12)

"Hari Kamis kami mendapatkan kiriman paket babi, kepala babi. 20 Maret sebenarnya dikirimnya hari Rabu ya, tapi baru dibuka hari Kamis. Untuk yang ngasih babi saya peringatkan anda, kenapa ngirimnya mentah?" (*Bocor Alus Politik*, 1:51-2:12)

Melalui tuturan tersebut, Stefanus menggunakan kata ganti "kami" yang merujuk pada kelompok jurnalis redaksi Tempo sebagai pihak yang menerima intimidasi berupa kiriman kepala babi. Penggunaan kata "kami" memperlihatkan bahwa ancaman hanya tertuju pada kelompok media Tempo tanpa melibatkan audiens. Lalu, penggunaan kata ganti orang pertama tunggal "saya" merujuk pada Stefanus sendiri secara individu yang menanggapi langsung pemberi teror dengan humor terkait kekecewaannya akan kepala babi yang diterima mentah dan kata ganti "Anda" yang digunakan untuk menyapa pihak pengirim paket kepala babi tersebut.

Data (SMik-13)

"Mereka pun enggak tahu, Pram, mau bahas apa sebetulnya ketika itu, sebelum ada pengakuan dari mereka, mereka belum dapat DIM-nya itu dari pemerintah." (*Bocor Alus Politik*, 10:40-10:48)

Dalam penggalan tuturan tersebut terdapat penggunaan kata ganti orang ketiga jamak, yaitu “mereka”. Kata ganti ini muncul dalam konteks ketika Francisca menjelaskan bahwa DIM (Daftar Investarisasi Masalah) baru diterima oleh anggota panitia kerja dan Komisi I DPR pada sore hari, sehari sebelum pembahasan dilakukan. Menanggapi hal tersebut, Hussein menegaskan “mereka pun enggak tahu mau bahas apa” yang merujuk pada ketidaksiapan anggota-anggota terlibat dalam memahami isi dari revisi UU TNI.

3. Stilistik

Dalam model analisis wacana kritis van Dijk, aspek stilistik berkaitan dengan pemilihan kata yang digunakan pembicara dalam menyampaikan maksud dan gagasannya. Pilihan kata tidak hanya berfungsi menyampaikan informasi, tetapi juga merefleksikan sikap, ideologi, dan posisi pembicara terhadap suatu peristiwa atau isu. Analisis pada aspek stilistika akan menelaah bagaimana tiga jurnalis Tempo—Hussein Abri Dongoran, Stefanus Pramono, dan Francisca Christy Rosana—memanfaatkan pilihan kata untuk menunjukkan sikap serta meyakinkan pendengar terhadap ide dan gagasan yang disampaikan.

Data (SMik-14)

“Masyarakat sipil itu sudah bergejolak menentang revisi Undang-Undang TNI.” (*Bocor Alus Politik*, 12:32-12:38)

Pembicara memilih kata “bergejolak” untuk menggambarkan respons masyarakat sipil akan hadirnya revisi UU TNI. Secara leksikal, kata tersebut memiliki makna gerakan yang kuat dan penuh tekanan emosional. Pembicara tidak menggunakan kata netral seperti “menolak” atau “tidak setuju”, melainkan memilih kata yang menunjukkan intensitas konflik sosial. Penggunaan kata “bergejolak” menunjukkan adanya ketegangan antara kelompok masyarakat dengan kekuasaan negara. Pilihan kata tersebut membangun persepsi bahwa revisi UU TNI merupakan isu serius yang menuai penolakan keras dari berbagai kalangan masyarakat.

Data (SMik-15)

“Ini bikin undang-undang kok semacam ini ngawur ya.” (*Bocor Alus Politik*, 33:11-33:14)

Secara leksikal, Hussein menggunakan kata “bikin” alih-alih “membuat” atau “menyusun”. Kata “bikin” merupakan kata yang lazim digunakan dalam percakapan sehari-hari oleh kalangan remaja sebagai sarana komunikasi. Penggunaan diksi ini menunjukkan gaya bahasa yang santai dan tidak kaku, sesuai dengan karakter podcast sebagai media diskusi publik untuk segala kalangan. Lalu, penggunaan kata “ngawur” menunjukkan sikap kritis pembicara terhadap proses revisi UU TNI. Pilihan kata tersebut mengekspresikan ketidakpuasan dan

ketidaksetujuan terhadap tindakan pemerintah yang dianggap terlalu sembrono terhadap kebijakan ini. Secara makna, “ngawur” berarti tidak teratur, tidak masuk akal, atau dilakukan tanpa pertimbangan yang matang. Dengan menyebut proses pembuatan undang-undang sebagai “ngawur”, pembicara tidak hanya menyampaikan kritik, tetapi juga membingkai kebijakan tersebut sebagai sesuatu yang tidak rasional dan profesional, sehingga kata “ngawur” digunakan pembicara untuk membangun penilaian bahwa proses penyusunan kebijakan tersebut dilakukan tanpa pertimbangan yang memadai.

4. Retoris

Aspek retorik berkaitan dengan cara pembicara menekankan makna tertentu dalam wacana yang akan memperlihatkan gaya berbicara yang digunakan. Dalam wacana podcast ini, media Tempo memanfaatkan unsur visual berupa tangkapan layar dan *box text* yang ditampilkan di tengah layar untuk menandai informasi penting agar menarik perhatian penonton. Retorik mencakup elemen seperti grafis dan metafora.

(1) Grafis

Elemen grafis memeriksa bagian-bagian yang ditekankan atau dianggap oleh pembicara. Penekanan tersebut dapat diamati melalui penggunaan unsur visual, seperti gambar atau tabel yang mendukung makna suatu pesan (Ardiansyah, 2024). Sejalan dengan itu, Eriyanto (2011) menyatakan bahwa elemen grafis memberikan efek kognitif, yakni mampu mengarahkan perhatian dan meningkatkan ketertarikan, serta menunjukkan bahwa suatu informasi itu dianggap penting sehingga perlu difokuskan. Data berikut menunjukkan adanya penekanan yang ditunjukkan pembicara melalui ujarannya.

Data (SMik-16)



Gambar 4.1 Postingan X Hasan Nasbi

Gambar tersebut menampilkan bentuk tangkapan layar yang diperbesar dan ditempatkan di tengah *frame* menutupi sebagian latar diskusi podcast pada menit ke 9:34. Unggahan media sosial X tersebut merupakan pernyataan dari Hasan Nasbi sebagai kepala kantor komunikasi kepresidenan yang menilai bahwa kelompok masyarakat sipil—yang disebut sebagai intelektual, *influencers*, dan aktivis—sebagai penyebar narasi bohong dan provokasi. Unggahan ini ditampilkan secara utuh, sehingga penonton dapat membaca langsung isi

pernyataan tanpa interpretasi dari pembicara. Melalui unggahan ini terlihat posisi pemerintah melalui Hasan Nasbi yang mengkritik masyarakat sipil karena menyuarakan aspirasinya. Di sisi lain, ketiga komunikator menyebut bahwa unggahan tersebut sudah dihapus, bahkan disertai informasi bahwa yang bersangkutan mendapat teguran. Postingan Hasan Nasbi menunjukkan adanya perbedaan sudut pandang antara pemerintah dan masyarakat sipil dalam memaknai revisi UU TNI.

Data (SMik-17)



Gambar 4.2 Berita Tempo terkait Mayor Teddy

Gambar ini menjelaskan posisi Sekretaris Kabinet (Seskab) dalam revisi UU TNI, khususnya terkait usulan memasukkan posisi tersebut ke dalam lembaga yang tercantum dalam pasal 47 ayat 1. Judul berita diikuti kutipan utama yang ditampilkan secara jelas, sementara bagian lain dibuat samar, sehingga fokus utama terletak pada peran Teddy Indra Wijaya. Isi kutipan menegaskan bahwa Teddy tidak hanya berperan sebagai sekretaris kabinet, tetapi merangkap sebagai sekretaris pribadi dan menjadi figur yang paling dekat dengan presiden dan terlibat dalam berbagai persoalan strategis. Hal tersebut memperkuat pernyataan Hussein yang mengatakan bahwa akses para menteri kepada presiden banyak melalui Teddy. Hal ini memperkuat pemahaman penonton mengenai pembahasan revisi UU TNI yang tidak dapat dilepaskan dari kekuasaan dan posisi-posisi strategis di sekitar presiden.

(2) Metafora

Penggunaan metafora tertentu dapat menjadi kunci utama dalam memahami suatu teks. Menurut Keraf (2006), metafora merupakan bentuk analogi membandingkan dua hal secara singkat. Metafora digunakan oleh pembicara secara strategis sebagai landasan berpikir, pembenaran atas pendapat, atau untuk menyampaikan gagasan tertentu kepada publik. Pembicara menggunakan kepercayaan masyarakat, ungkapan sehari-hari, peribahasa, pepatah, petuah leluhur, hingga kutipan yang diambil dari ayat-ayat suci untuk memperkuat pesan utama yang disampaikan (Eriyanto, 2011). Dalam tayangan podcast ini, penggunaan metafora dapat ditemukan pada data-data berikut.

Data (SMik-18)

“Nah, tapi ada pasal tambahan, Pram. 47 ayat 2 yang mana memang kalau misalkan tentara-tentara itu menjabat di lembaga selain yang diatur di pasal 1 mereka harus mengundurkan diri. Prabowo menggarisbawahi dan pasal itu juga menurut sebuah narasumber merupakan pasal gula-gula dalam artian untuk menangkis kalau ada tuduhan bahwa TNI ini bisa masuk ke mana-mana.” (*Bocor Alus Politik*, 19:22-19:39)

Dalam pernyataan tersebut Hussein Abri menyisipkan ungkapan “pasal gula-gula” untuk menjelaskan salah satu ketentuan dalam revisi UU TNI. Penggunaan metafora ini menyiratkan bahwa pasal 47 ayat 2 bukan merupakan inti dari kebijakan, melainkan hanya sebagai pelengkap atau pemanis untuk meredam kritik dan kekhawatiran yang muncul serta membuat kebijakan terlihat lebih dapat diterima oleh publik. Hal ini diperkuat dengan penjelasan bahwa pasal 47 ayat 2 digunakan untuk menangkis tuduhan bahwa TNI dapat masuk ke berbagai lembaga tanpa batas. Hussein Abri tidak hanya menjelaskan fungsi dari pasal tambahan tersebut, tetapi juga mengisyaratkan bahwa keberadaannya digunakan sebagai strategi untuk meredam kritik publik terhadap perluasan peran TNI dalam ranah sipil.

Data (SMik-19)

“Karena kalau kita ngobrol sama orang-orang DPR maupun pejabat pemerintah ya, ini urusan narkoba ini ya ibaratnya tambang emas lah begitu kan, di situ banyak sekali uang-uang.” (*Bocor Alus Politik*, 24:04-24:12)

Dalam pernyataan tersebut, pembicara menyebutkan “tambang emas” untuk menggambarkan sektor narkotika dalam konteks perluasan peran TNI. Penggunaan metafora ini menyiratkan adanya keuntungan besar atau kepentingan ekonomi di balik isu ini. Secara makna “tambang emas” merujuk pada sumber daya yang menghasilkan keuntungan besar dan bernilai tinggi. Ketika dikaitkan dengan urusan narkoba, ungkapan tambang emas tidak hanya menggambarkan besarnya perputaran uang dalam sektor tersebut, tetapi juga mengindikasikan bahwa bidang narkotika menjadi ruang strategis yang menarik untuk banyak pihak. Hal ini diperkuat dengan konteks sebelumnya yang membahas rencana pembentukan satuan tugas (satgas) narkotika oleh TNI, sehingga metafora ini berfungsi untuk menjelaskan mengapa sektor tersebut menjadi penting dan diperebutkan. Dengan kata lain, metafora ini membangun pemahaman bahwa perluasan peran TNI dalam sektor narkotika tidak dapat dilepaskan dari potensi keuntungan yang ada di dalamnya.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai analisis wacana kritis Teun A. van Dijk terhadap podcast *Bocor Alus Politik* dengan judul “Aktor dan Lobi-Lobi di Balik Revisi UU TNI” dapat disimpulkan bahwa dengan dimensi teks yang berfokus pada analisis kebahasaan terlihat struktur makro atau tema yang diangkat pembicara adalah proses pembentukan revisi Undang-Undang TNI tidak ideal. Tema tersebut didukung oleh berbagai subtopik, seperti, tujuan revisi, perluasan peran TNI, minimnya transparansi dalam pembahasan, penolakan masyarakat sipil, serta adanya kepentingan politik yang memengaruhi proses pembahasan revisi.

Pada superstruktur, wacana disusun secara sistematis melalui bagian pendahuluan, isi, dan penutup. Setelah itu, pada struktur mikro, penggunaan strategi kebahasaan seperti aspek semantik, sintaksis, stilistik, dan retorik dimanfaatkan untuk memperkuat kritik terhadap proses revisi UU TNI melalui penyajian latar, detail-detail pasal dan peristiwa, pilihan diksi, metafora, dan unsur visual yang mendukung pesan utama. Penggunaan strategi-strategi tersebut memperlihatkan bahwa bahasa tidak digunakan secara netral, melainkan sebagai alat untuk membangun perspektif tertentu mengenai isu yang dibahas. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa podcast tidak hanya berfungsi sebagai media penyampai informasi, tetapi juga memiliki dampak dan pengaruh nyata yang mampu membentuk pemahaman audiens terhadap isu politik. Melalui struktur teks yang digunakan, podcast *Bocor Alus Politik* menggambarkan revisi UU TNI sebagai kebijakan yang problematis.

SARAN

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam mengkaji analisis wacana kritis, khususnya model Teun A. van Dijk. Peneliti selanjutnya disarankan dapat mengembangkan kajian tidak hanya pada dimensi teks, tetapi juga pada dimensi kognisi sosial, dan konteks sosial agar hasil analisis menjadi lebih komprehensif. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat memperluas objek kajian pada berbagai bentuk wacana lainnya, seperti berita daring, pidato politik, konten media sosial, program televisi, film, hingga lirik lagu, sehingga dapat memberikan perbandingan yang lebih beragam.

DAFTAR RUJUKAN

Artikel

- Arifeni, S., Baehaqie, I., & Muttaqin, N. A. (2024). Analisis Wacana Kritis Model Teun A. van Dijk pada Surat Kabar Online Kompas dengan Tajuk “Guru Dijejati Beragam Aplikasi Pendidikan”. *Jurnal Onoma Pendidikan, Bahasa, dan Sastra*, 10(2), 2396–2408.

<https://doi.org/10.30605/onoma.v10i2.3549>

- Dewi, L. L., Nurjaya, I. G., & Utama, I. D. B. (2025). Analisis Wacana Kritis Model Teun A. van Dijk Pidato Perdana Presiden RI 2024. *Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, 15(3), 336–347.

<https://doi.org/10.23887/jpbsi.v15i3.102049>

- Pramitasari, A., & Khofifah, I. (2022). Analisis Wacana Kritis Pendekatan Teun A. van Dijk pada Pemberitaan “PMK Mengancam, Ridwan Kamil Minta Pemda Waspadai Hewan Ternak Jelang Idul Adha” dalam Sindo News. *Jurnal Penelitian Inovatif*, 2(2), 307–316.

<https://doi.org/10.54082/jupin.82>

- Prihartono, R., & Suharyo. (2022). Analisis Wacana Kritis Model Teun A. van Dijk dalam “#DebatKeren Papua-Budiman Sudjatmiko vs Dandhy Laksono”. *Jurnal Wicara*, 1(2), 90–96.

<https://doi.org/10.14710/wjsbb.2022.16367>

Buku

- Eriyanto. (2001). *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*. PT LKiS Printing Cemerlang.
- Eriyanto. (2011). *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*. PT LKiS Printing Cemerlang.
- Ghofur, & Ibrahim, J. T. (2023). *Kritik dan Interpretasi Teks Inaugurasi Trump: Analisis Wacana Kritis Bahasa, Kekuasaan, dan Ideologi*. Jejak Pustaka.
- Miles, M. B., & Huberman, M. (1992). *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta, Indonesia: UI-Press.
- Sudaryanto. (2018). *Metode dan Aneka Teknik Analisis Bahasa: Pengantar Penelitian Wahana Kebudayaan Secara Linguistik*. Duta Wacana University Press.
- Van Dijk, T. A. (2008). *Discourse and Power*. Palgrave Macmillan.

Berita Daring

- BBC News Indonesia. (2025, Maret 23). *Jurnal Tempo Diteror Paket Berisi Bangkai Tikus yang Dipenggal dan Kepala Babi—‘Kondisi Pers Nasional Tidak Sedang Baik-Baik Saja’*. BBC News Indonesia.
<https://www.bbc.com/indonesia/articles/cvg51xnzzv4o>

Skripsi

- Firdausy, N. (2023). *Analisis Wacana Kritis Teun A. van Dijk pada Isu Nikah Muda di Akun Instagram @Premarriagetalk* (Skripsi, UIN Walisongo).
<https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/23984>
- Sari, F. P. (2024). *Analisis Wacana Kritis Teun A. van Dijk terhadap Podcast Youtube Denny Sumargo* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq).
<http://digilib.uinkhas.ac.id/id/eprint/37232>

Video

- TempoVideoChannel. (2025, Maret 22). *Aktor dan Lobi-Lobi di Balik Revisi UU TNI | Bocor Alus Politik* [Video]. YouTube.
<https://youtu.be/z6nSQrYWJlY?si=IpsbgXS2ooSe6hND>